

BAB I

Pendahuluan

A. Latar belakang

Dunia saat ini sedang menghadapi musibah besar dengan munculnya virus baru yaitu Covid-19. Virus Covid-19 tersebut diperkirakan sudah tersebar di 200 negara. Virus Covid-19 sendiri termasuk ke dalam salah satu jenis penyakit menular karena terjadi sindrom pernapasan akut *Coronavirus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau *SARS-CoV-2*). Virus Covid-19 masih menjadi bagian dari *Coronavirus* yang dapat menular ke tubuh hewan. Ketika manusia terjangkit oleh Covid-19 maka akan menyebabkan penyakit infeksi di saluran pernapasan, seperti flu, MERS, (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*severe acute respiratory syndrome*). Virus Covid-19 ini termasuk ke dalam *Coronavirus* jenis baru yang muncul di Kota Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019 (Ilmiah, 2020; Hui, et al. 2020).

Indonesia sendiri masuk ke dalam daftar negara yang sudah terjangkiti oleh virus Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 muncul pertama kali pada 2 maret 2020, berawal dari salah seorang warga Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang. Hal tersebut telah diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai sumber baik dari dalam atau pun luar negeri telah memprediksi bahwa kasus Covid-19 di Indonesia akan mengalami peningkatan (www.habibiecenter.or.id). Indonesia sempat berada di peringkat kedua kematian di dunia yang

disebabkan oleh virus Covid-19 sekitar 38 orang meninggal dunia akibat virus tersebut. Pada saat berita tersebut diluncurkan, angka kematian di Indonesia yang diakibatkan oleh virus Covid-19 mencapai 8,44% (Okenews.com, 21 Maret 2020).

Hingga sampai sekarang ini kasus virus Covid-19 terus bertambah, berdasarkan data yang diterima pada hari Selasa (12/05/2020) ada sekitar 484 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Dari data tersebut maka jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sejak pertama kali diumumkan hingga saat ini mencapai 14.749 kasus. Dengan melihat fenomena tersebut Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepada setiap kepala daerah agar tidak terburu-buru mengenai rencana pelonggaran PSBB. Dalam rapat terbatas melalui telekonferensi, Presiden RI Joko Widodo mengharapkan adanya rapat evaluasi dan data-data terkait penerapan PSBB secara menyeluruh di 4 provinsi serta 72 kabupaten dan kota. Berdasarkan data yang diperoleh, penerapan PSBB di beberapa daerah memberikan hasil yang berbeda. Dari data tersebut, ada beberapa daerah yang berhasil menurunkan kasus Covid-19 secara kontinu, namun ada sebagian daerah dengan kasus Covid-19 masih fluktuasi dan belum konsisten (<https://nasional.kompas.com>, 12 April 2020).

Wabah virus Covid-19 ini juga mempengaruhi perekonomian Indonesia, berbagai langkah telah dilakukan oleh Menteri keuangan untuk tetap menjaga keuangan negara. Salah satunya dalam menjaga

perekonomian, pemerintah Indonesia menerbitkan PMK-23/2020 dan PMK 28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan adanya insentif fiskal tersebut, telah diperkirakan bahwa akan terjadi penurunan penerimaan pajak bulan april, kemudian terkait (PERPU 1/2020) yang mengatur tentang penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) dan diperkirakan akan terjadi penurunan angsuran PPh pasal 25 badan mulai bulan mei 2020. Komitmen pemerintah dalam mengatur kestabilan keuangan negara supaya terciptanya kesejahteraan dan keselamatan masyarakat melalui pengelolaan fiskal yang sebaik-baiknya lewat peningkatan pendapatan negara secara optimal dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran (<https://www.kemenkeu.go.id>, 17 april 2020).

Berbagai upaya pencegahan terhadap virus Covid-19 juga dilakukan oleh Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Desa Panggungharjo menghadirkan sebuah program untuk menangani dan menanggulangi Covid-19 yaitu Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) dalam aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Sejak senin (28/04/2020) Pemerintah Desa Panggungharjo mengadakan musyawarah koordinasi dengan 14 padukuhan terkait dengan keadaan darurat wabah Covid-19. Musyawarah koordinasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah desa dan satgas Covid-19 dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 yang berupa, klinis, non-klinis, dan sosial. Koordinasi ini diadakan secara bergantian antar padukuhan yang dihadiri oleh dukuh, RT,

pogiat, dan LPMD. Disamping itu, pemerintah desa Panggungharjo membuat aplikasi website mitigasi klinis Panggung Tanggap Covid-19 untuk masyarakat supaya bisa melaporkan kondisi Kesehatan setiap hari melalui www.panggungharjo.desa.id/covid/. Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) desa Panggungharjo mendistribusikan 2.456 paket sembako ke seluruh 14 padukuhan di desa Panggungharjo. Selain warga di 14 padukuhan tersebut, tim PTC-19 juga memberikan bantuan kepada pihak Rumah Tahfidz Al-Ansor berupa 25 kg dan *face protector* dan APD kepada Puskesmas Sewon II dan klinik NU Sewon sebanyak 20 unit APD dan 10 buah face protektor (www.panggungharjo.desa.id, 10 april 2021).

Sebelumnya adanya pandemi Covid-19 pemerintah desa Panggungharjo sering menerima banyak kunjungan tamu yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kunjungan tamu tersebut bertujuan untuk melakukan study banding dengan pemerintah desa terkait tata kelola desa dan Bumdes. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bumdes Panggung Lestari bahwa sejak periode bulan januari hingga September 2018, desa Panggungharjo telah menerima kunjungan tamu sebanyak 1000 tamu yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, kader PKK, kader posyandu, dan pejabat tinggi pemerintahan. Selain itu, pemerintah desa Panggungharjo sering melakukan pertemuan tatap muka di aula kelurahan seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, pelantikan pejabat BPD desa 2018 – 2024 dan Kasi desa, serta *focus group discussion* bersama Kementerian Desa PDTT sebelum ada pandemi Covid-19. Sebagaimana dengan adanya PPKM

dan maklumat Kepala desa bahwa semua kegiatan yang membutuhkan tatap muka seperti pelatihan dan musyawarah desa ditiadakan untuk sementara sampai keadaan wabah Covid-19 membaik. Hal tersebut tentunya membuat pemerintah desa mengeluarkan kebijakan baru terkait protokol kesehatan dan mengalihkan kegiatan tatap muka menjadi daring, salah satunya yaitu tidak menerima kunjungan tamu dari luar daerah.

Hingga pada hari rabu (08/04/2020) pemerintah desa Panggungharjo melakukan program rapid test terhadap warga Padukuhan Pelemsewu. Rapid test ini dilakukan sebagai prosedur jika sudah ada salah satu warga yang positif virus corona, termasuk dengan orang-orang yang pernah kontak dengan warga yang positif corona tersebut. Selain itu, melalui Gerakan Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19), pemerintah Desa Panggungharjo membuka dukungan dari semua pihak untuk ikut terlibat membantu penanganan Covid-19 (www.panggungharjo.desa.id, 20 juli 2020). Selain melakukan program rapid test terhadap warga Padukuhan Pelemsewu, kepala desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt menjemput langsung warga desa yang dinyatakan Covid-19.

Pandemi Covid-19 saat ini ikut berdampak pada sektor ekonomi masyarakat desa Panggungharjo. Rata-rata masyarakat desa panggungharjo bekerja sebagai karyawan pabrik swasta yang mana pabrik tersebut juga terkena imbas dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan pabrik sehingga

banyak masyarakat desa Panggungharjo yang menganggur. Salah satu dampak pandemi Covid-19 berimbas pada badan usaha milik desa yakni Bumdes Panggung Lestari yang harus tutup sementara selama 3 bulan diawal pandemi Covid-19. Selain itu, Bumdes Panggung Lestari harus memberhentikan sementara sebanyak 50 karyawan Bumdes yang seluruhnya adalah masyarakat desa Panggungharjo. (www.panggungharjo.desa.id)

Dalam menghadapi situasi wabah Covid-19, pemerintah Desa Panggungharjo meluncurkan inovasi baru yaitu Pasar Desa yang berbasis online (daring) dengan platform Pasardesa.id. Program Pasardesa.id dibentuk sebagai upaya menjembatani antara barang-barang persediaan yang terbatas di toko dan warung yang ada di Desa Panggungharjo sehingga dapat memenuhi kebutuhan warga setempat (www.jogja.tribunnews.com). Pasardesa.id dibangun atas empat nilai yang mendasarinya, yaitu mitigasi, solidaritas, kolaborasi, dan ekonomi berbagi. Pada tanggal 13 April 2020 program pasardesa.id diresmikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar melalui video *teleconference* (www.panggungharjo.desa.id, 28 oktober 2020).

Untuk mewujudkan kinerja yang positif dan memberikan kontribusi kepada masyarakat maka sangatlah penting aspek *good governance* diterapkan pada pemerintahan Desa Panggungharjo. Aspek *good governance* di Indonesia diartikan sebagai suatu pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa. *Good governance* sendiri menjadi

paradigma baru dalam sistem pemerintahan dan administrasi pembangunan. Sehingga menjadikan pemerintah sebagai *agent of change* dan *agent of development*. Kemendagri (2016) dalam pemerintahan desa konsep *good governance* merupakan suatu strategi untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi desa tidak akan kuat dan bermanfaat jika tidak didasari oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsivitas. *Good governance* menjadi salah satu isu dari kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk menciptakan pemerintah yang baik (Santoso dan Pambelum, 2008) dan terhadap pemerintah desa. Perbaikan instansi kinerja pemerintah akan memberikan dampak yang luas di sektor ekonomi dan sektor politik (Dwiyanto, 2002) pada bidang ekonomi akan mendorong perbaikan pemerintah pada sektor investasi, sedangkan pada bidang politik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Tranparansi bermakna sebagai keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam menyajikan informasi-informasi aktual terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi (Mardiasmo, 2010:30). Tranparansi sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam melaksanakan amanah dari masyarakat sehingga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan terhindar dari perbuatan korupsi.

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban yang memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002). Pertanggungjawaban laporan keuangan desa diatur dalam undang-undang desa yang berpatokan pada Permendagri No. 113 tahun 2014 yaitu membahas tentang keuangan desa yang harus dikelola dengan asas; 1). transparan; 2). akuntabel; 3). partisipatif; 4).dilakukan dengan tertib; dan 5). Disiplin anggaran. Pelaporan keuangan merupakan suatu wujud proses akuntabilitas yang menggambarkan tentang informasi keuangan yang dilaporkan dan disajikan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. (Suwadjono, 2006)

Sedangkan responsivitas merupakan bentuk kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyusun agenda serta melaksanakan program pelayanan publik terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Dwiyanto, 2006). Responsivitas dalam prinsip pelaksanaan *good* dan *clean governance* merupakan ukuran kinerja berhasil atau tidaknya lembaga publik dalam merespon persoalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Dwiyanto, 2008) menjelaskan bahwa organisasi dengan responsivitas rendah memiliki kinerja yang buruk. Dengan demikian, prinsip *good governance* harus selalu diaplikasikan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah terutama dalam

pengelolaan dana desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dalam Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah Yang Baik, pada bulan Oktober 2001 telah disepakati Sepuluh Prinsip Kepemerintahan Daerah Yang Baik oleh seluruh anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) dari sepuluh prinsip tersebut salah satunya adalah *responsiveness* atau daya tanggap meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali.

Hal ini seiring dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal, ayat 27 :

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

Penelitian tentang pengelolaan dana desa dan kinerja Pemerintah desa telah dilakukan oleh Miftahuddin (2018) yang meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian pengelolaan dana desa juga dilakukan oleh Aruni (2018) mengenai pengelolaan alokasi dana desa untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat di Desa Panggungharjo. Penelitian lain juga

dilakukan oleh (Eko, et al. 2017) yang meneliti tentang efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. Sedangkan penelitian tentang Badan Usaha Milik Desa Panggungharjo dilakukan oleh (Sudrajat, et al. 2020) yang meneliti peran Bumdes Panggung Lestari dalam pemberdayaan masyarakat desa Panggungharjo.

Peran Dana Desa sangatlah penting bagi pembangunan desa seperti yang telah diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menerangkan, Presiden sengaja menambah alokasi anggaran program dana desa agar pemerataan ekonomi dapat tercapai, termasuk di pelosok-pelosok desa. dihadapan anggota DPR/MPR Presiden Joko Widodo pada Agustus lalu mengungkapkan, anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp. 72 triliun. Jumlah itu naik Rp. 2 triliun dari tahun 2019 yang hanya berkisar Rp. 70 triliun. Presiden menyebut kenaikan anggaran dana des aini ditujukan untuk pengembangan ekonomi desa.

Dengan melihat keunikan dan kebermanfaatannya yang didapatkan dari Dana Desa tersebut maka melalui penelitian berjudul ***“TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA***

TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 dengan studi Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah;

1. Bagaimana implementasi tranparansi pengelolaan dana desa selama pandemi Covid-19?
2. Bagaimana implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa selama pandemi Covid-19?
3. Bagaimana implementasi responsivitas pengelolaan dana desa selama pandemi Covid-19?
4. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dihadapi pemerintah desa selama pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Mengetahui implementasi tranparansi dana desa selama pandemi Covid-19
2. Mengetahui implementasi akuntabilitas dana desa selama pandemi Covid-19
3. Mengetahui implementasi responsivitas dana desa selama pandemi Covid-19
4. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dihadapi pemerintah desa selama pandemi Covid-19

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah;

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menambah referensi atau khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam pengelolaan Dana Desa di tengah situasi wabah pandemi Covid-19 yang sebelumnya tidak ada.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan perbaikan kualitas pelayanan dan pengelolaan Dana Desa bagi pemerintah Desa Panggunharjo untuk kedepannya lebih baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi administrasi publik dan pengelolaan Dana Desa dalam mengelola dana desa ditengah wabah pandemi Covid-19 di Desa Panggunharjo yang sebelumnya tidak ada.

